

## Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon dalam Menekan Angka Golongan Putih Pada Pemilu 2024

Syifa Humaira, Rangga Galura Gumelar

Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Palka KM 3 Sindangsari, Kota Serang, 42118, Indonesia

Email : [Syifahumaira46@gmail.com](mailto:Syifahumaira46@gmail.com) [Ranggagumelar@untirta.ac.id](mailto:Ranggagumelar@untirta.ac.id)

### **Abstract**

*Political Communication is politics that becomes the message in the communication process. A Political Communicator is someone whose job is to convey messages or information to the recipient of the message. A political communicator is someone who finds it difficult to carry out the political communication process regularly and consistently because those who become political communicators not only exchange political messages but they will become leaders in the process of forming political opinions. Strategy in communication is a way of carrying out the communication process so that communication can run well. Communication is basically planning to achieve a goal with communication strategy as a guide in implementing the communication process. The 2024 election is the period for selecting the president, vice president and other legislative candidates. The Cilegon City KPU is one of the implementers of city-level elections in the city of Cilegon. In political activities like this, there is a process of political communication from the KPU to the community. The Cilegon City KPU as a communicator plays a role in conveying political messages to the public. Seeing the high number of abstaining voters from Cilegon City in the 2019 election is a challenge for the Cilegon City KPU as the organizer of the upcoming 2024 election.*

*Keywords: Political Communication, 2024 General Election, The Cilegon City KPU.*

### **Abstrak**

Komunikasi Politik merupakan politik yang menjadi pesan dalam proses komunikasi. Komunikator Politik adalah seseorang yang bertugas dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada penerima pesan. Komunikator politik adalah seseorang yang sulit untuk melakukan proses komunikasi politik secara tetap dan konsisten dikarenakan mereka yang menjadi komunikator politik tidak hanya bertukar pesan politik tetapi mereka akan menjadi pemimpin dalam proses pembentukan opini politik tersebut. Strategi dalam komunikasi adalah cara dalam pelaksanaan proses komunikasi agar suatu komunikasi dapat berjalan dengan baik. Komunikasi pada dasarnya adalah perencanaan untuk mencapai suatu tujuan yang strategi komunikasi sebagai petunjuk dalam pelaksanaan proses komunikasi. Pelaksanaan pemilihan umum 2024 adalah periode pemilihan presiden, wakil presiden serta calon legislatif lainnya. KPU Kota Cilegon merupakan salah satu pelaksana pemilu tingkat kota di kota Cilegon. Pada kegiatan politik seperti ini terjadi proses komunikasi politik dari KPU kepada masyarakat. KPU Kota Cilegon sebagai komunikator berperan dalam menyampaikan pesan politik kepada masyarakat. Melihat dari tingginya jumlah pemilih golput dari kota Cilegon pada pemilihan umum 2019 menjadi tantangan bagi KPU Kota Cilegon sebagai pelaksana pemilihan umum 2024 mendatang.

Kata Kunci: Komunikasi Politik, Pemilihan Umum 2024, KPU Kota Cilegon.

## 1. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang mengantut sistem demokrasi. Sistem demokrasi berarti kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Pemilu atau pemilihan umum merupakan suatu perwujudan dalam pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia. Pemilu dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pemilihan umum yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara umum, langsung, bebas, rahasia, jujur serta adil dan memiliki sifat nasional, tetap, dan mandiri. Partisipasi pemilih dalam pemilu beberapa tahun terakhir ini mengalami kenaikan yang rendah. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten, tingkat golput 23,30% pada pemilu 2004, 27,45% pada pemilu 2009, 30,42% pada pemilu 2014, dan 36,9% pada pemilu 2019. Melihat dari data tersebut dapat mengidentifikasi akan terjadi peningkatan pemilih yang melakukan golput, kemudian dari hal tersebut juga menunjukkan bahwa belum ada kemajuan yang signifikan dari KPU dalam menyelenggarakan Pemilu sehingga perlu diteliti terkait penekanan angka golput khususnya pada penelitian ini yaitu di kota Cilegon. Dalam proses komunikasi politik, KPU Kota Cilegon disebut sebagai komunikator politik yang bertugas untuk menyampaikan informasi atau pesan mengenai pemilu kepada masyarakat. Dalam

terselenggaranya agenda pemilu yang baik maka dibutuhkan komunikasi politik yang baik dari KPU sebagai komunikator. Penelitian ini berfokus pada dua masalah yaitu komunikator politik dan penyampaian pesan politik kepada masyarakat agar tidak golput dalam pemilu 2024 mendatang di Kota Cilegon. Proses komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Pesan berupa informasi atau gagasan yang ingin disampaikan dari seorang komunikator kepada komunikan. Komunikator dalam hal ini KPU Kota Cilegon berperan dalam menyampaikan informasi dengan baik kepada komunikan atau masyarakat. Bagaimana KPU Kota Cilegon menyampaikan pesan melalui sosialisasi-sosialisasi pemilihan umum ditengah masyarakat Kota Cilegon.

### 1.1. Rumusan masalah

Peran KPU Kota Cilegon dalam menekan angka golput pada pemilu 2024 di Kota Cilegon?

## 1.2. Maksud dan Tujuan

- 1) Untuk menjelaskan peran KPU Kota Cilegon sebagai komunikator dalam menekan angka golput pada pemilu 2024 di Kota Cilegon
- 2) Untuk menjelaskan proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh KPU Kota Cilegon dalam menekan angka golput pada pemilu 2024 di Kota Cilegon

## 1.3. Kegunaan Penelitian

### Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini didapatkan manfaat secara teoritis yang diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu komunikasi khususnya komunikasi politik dan menjadi referensi pembelajaran dalam rumpun ilmu komunikasi.

### Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi saran untuk mahasiswa ilmu komunikasi yang sedang melakukan penelitian terkait kajian komunikasi politik. Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi data untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan pilkada.

## 2. Kajian Pustaka dan Kerangka pemikiran

Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari satu individu ke individu lainnya. Itu berasal dari kata Inggris

"communication" dan berakar pada kata "kommunis" yang mengindikasikan pemahaman bersama. Ini menunjukkan bahwa komunikator dan penerima pesan memiliki persepsi yang sama tentang topik yang dibahas. Komunikasi adalah cara untuk berinteraksi dan menyampaikan pernyataan kepada orang lain. Namun, keefektifan komunikasi tergantung pada kemampuan komunikator untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan, seperti perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku.

Komunikasi Politik merupakan politik yang menjadi pesan dalam proses komunikasi. Komunikasi politik membicarakan bagaimana politik dapat memiliki pengaruh, wewenang hingga kekuasaan dengan melalui proses penyampaian pesan dari komunikator (pengirim pesan) kepada komunikan (penerima pesan). Komunikasi politik juga diartikan sebagai proses komunikasi terarah terhadap suatu pengaruh sehingga komunikasi ini mengikat seluruh warga masyarakat. Lasswell berpendapat bahwa komunikasi politik membahas terkait dua hal yang sudah jelas, yaitu komunikasi politik berusaha dalam mendapatkan tujuan dengan nilai-nilai yang dibentuk di dalam melalui proses perilaku yang sesungguhnya. Kemudian, komunikasi politik memiliki tujuan masa depan dan berhubungan dengan masa lalu dengan memperhatikan segala yang telah terjadi di

masa lalu. Komunikator Politik adalah seseorang yang bertugas dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada penerima pesan. Komunikator politik adalah seseorang yang sulit untuk melakukan proses komunikasi politik secara tetap dan konsisten dikarenakan mereka yang menjadi komunikator politik tidak hanya bertukar pesan politik tetapi mereka akan menjadi pemimpin dalam proses pembentukan opini politik tersebut. Menurut Nimmo, ada tiga kategori pelaku politik yaitu komunikator politik, komunikator profesional dalam lingkup politik, serta aktivis politik.

Bagi Gabriel Almod berkata kalau komunikasi politik ialah salah satu guna yang terdapat dalam tiap sistem politik“ All of the functions perfomed in the political system political socialization and recruitment, interest articulation, interest aggregations, rule making, rule application, and rule adjudication are perfomed by means of communication.”Yang mempunyai makna ialah seluruh yang dicoba dalam sistem politik lewat sosialisasi politiiik, rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agresi kepentingan, pembuatan ketentuan, serta penghakiman ketentuan, dicoba lewat komitmen. Komunikasi politik memiliki beberapa komponen penting yaitu pertama, komunikator dalam politik yang dapat berbentuk Lembaga, individu, dan sekumpulan orang. Komunikator dalam politik menjadi pihak penyampaian

informasi dalam proses komunikasi. Komunikator menurut Nimmo adalah seseorang yang memainkan peran sosial terutama dalam membentuk opini publik. Kedua, yang menjadi unsur penting komunikasi politik adalah publik atau komunikan dalam komunikasi politik. Komunikan berperan sebagai penerima pesan yang nantinya akan meneruskan pesan kepada publik yang lain. Komunikan tuga dapat memberikan umpan balik dalam bentuk pikiran, perilaku, hingga sikap politiknya. Ketiga, saluran atau media komunikasi politik merupakan unsur penting dikarenakan sebagai penyalur tersampainya pesan. Dalam komunikasi politik, komunikator selain berperan menyampaikan pesan juga berperan sebagai saluran komunikasi yang datang dari public atau Masyarakat sebagai khalayaknya.

Strategi dalam komunikasi adalah cara dalam pelaksanaan proses komunikasi agar suatu komunikasi dapat berjalan dengan baik. Komunikasi pada dasarnya adalah perencanaan untuk mencapai suatu tujuan yang strategi komunikasi sebagai petunjuk dalam pelaksanaan proses komunikasi. Dalam penyusunan proses komunikasi dibutuhkan strategi komunikasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yaitu dengan melakukan pengenalan sasaran komunikasi atau siapa yang menjadi komunikan. Kedua, memilih media

komunikasi yang tepat. Mulai dari pesan yang ingin disampaikan hingga teknik yang akan digunakan dalam penyampaian pesan. Ketiga, pemahaman tujuan dari proses penyampaian pesan pada komunikasi dengan menghubungkan isi pesan dan teknik yang digunakan. Selanjutnya, mengetahui peran komunikator dalam proses komunikasi dengan mengetahui faktor penting dari seorang komunikator yaitu komunikator harus memiliki daya tarik sehingga komunikator dapat berhasil mempengaruhi sikap, opini serta perilaku dari komunikan. Kemudian, kredibilitas sumber yaitu faktor kedua yang harus dimiliki komunikator. Kepercayaan menjadi landasan dalam faktor ini sehingga komunikator harus memiliki sifat empati.

Pemilihan umum adalah bentuk nyata dari kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di negara Indonesia berdasarkan kepada UUD 1945 dan Pancasila. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh lembaga pemilihan umum yang memiliki keprofesionalan, akuntabel dan berintegritas tinggi. Pemilihan umum dianggap sebagai perwujudan demokrasi dengan meliputi kegiatan politik seperti partisipasi partai, lobbying dan sebagainya.

Golongan Putih atau yang biasa disebut sebagai golput merupakan sikap acuh tak acuh atau cuek dan apatis dari masyarakat terhadap

keadaan politik sehingga tidak ikut berpartisipasi dengan adanya pemilihan umum yang menjadi pesta besar demokrasi di Indonesia.

Kemunculan golput diawali dengan adanya sekelompok pemuda jelang pemilu 1977 yang memboikot pemilihan umum dikarenakan pada saat itu pemilihan umum tidak sesuai dengan syarat secara demokratis. Syarat yang disebut kurang adalah sas kebebasan yang merupakan bagian dari pemilihan umum yang jujur dan adil sehingga sekelompok pemuda tidak melakukan pemilihan di TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Pemilih secara resmi dikategorikan dengan dua kategori yaitu pemilih dengan suara tidak sah dan pemilih dengan tidak menggunakan hak pilihnya. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih tersebut dinamakan dengan pemilih golput atau pemilih yang tidak datang ke TPS karena kendala lain. Pemilih golput menjadi Gerakan moral dalam bentuk perlawanan terhadap kekuasaan karena hasil pemilihan umum tidak mementingkan rakyat.

Pelaksanaan pemilihan umum 2024 adalah periode pemilihan presiden, wakil presiden serta calon legislatif lainnya. KPU Kota Cilegon merupakan salah satu pelaksana pemilu tingkat kota di kota Cilegon. Pada kegiatan politik seperti ini terjadi proses

komunikasi politik dari KPU kepada masyarakat. KPU Kota Cilegon sebagai komunikator berperan dalam menyampaikan pesan politik kepada masyarakat. Melihat dari tingginya jumlah pemilih golput dari kota Cilegon pada pemilihan umum 2019 menjadi tantangan bagi KPU Kota Cilegon sebagai pelaksana pemilihan umum 2024 mendatang. Hal ini yang membuat peneliti terdorong untuk melakukan penelitian terkait proses komunikasi KPU Kota Cilegon

### 3. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan metode yang digunakan untuk mengungkap kebenaran dengan berlandaskan pertimbangan logis dan sistematis dalam rangka memperoleh hubungan yang terstruktur dari fakta-fakta. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan, menemukan, dan mengkonfirmasi kebenaran atas suatu masalah. Dalam pendekatan penelitian kualitatif, penulis akan melakukan pengamatan, pencatatan, pertanyaan, dan pencarian narasumber yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data akan diorganisir melalui wawancara dan studi literatur. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik deskriptif yang memungkinkan untuk memberikan gambaran mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti. Menurut Moleong (2017), data dalam penelitian ini berupa kata-kata dan gambaran,

bukan angka-angka. Oleh karena itu, laporan penelitian akan memuat kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran yang lebih baik.

Paradigma penelitian merupakan cara pandang peneliti terkait fakta sosial dan sikap peneliti dalam mempelajari dan memahami suatu permasalahan serta kriteria dalam menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivistik. Paradigma post-positivistik merupakan paradigma yang mencoba untuk mengerti makna dibalik sesuatu sehingga tidak hanya berbicara terkait yang dapat terlihat, teraba, maupun terasa. Paradigma ini melihat realitas sosial sebagai indikasi yang konsisten, terikat dengan konteks, bertabiat lingkungan, dan penuh arti. Oleh karena itu, ia mengenali keberadaannya tidak dalam bentuk dimensi tetapi melalui eksplorasi agar dapat menjelaskan secara menyeluruh. Peneliti melihat secara langsung realitas sosial saat ini tentang peran KPU Kota Cilegon dalam proses komunikasi untuk mengurangi angka golput pada pemilihan umum 2024.

Paradigma post-positivistik menghasilkan pendekatan kualitatif yang lebih suka menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fenomena atau indikasi. Peneliti memilih paradigma post-positivistik karena mereka ingin mempelajari dan menceritakan secara menyeluruh proses komunikasi yang digunakan oleh KPU Kota

Cilegon untuk mengurangi jumlah golput pada pemilihan umum tahun 2024. Peneliti menjelaskan proses ini dengan kata-kata daripada menggunakan angka.

Penelitian ini difokuskan pada proses komunikasi politik yang bertujuan untuk mengurangi angka golput pada pemilihan umum tahun 2024 di Kota Cilegon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga data diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan subjek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer, seperti wawancara dengan pihak KPU Kota Cilegon dan pengamatan langsung, serta data sekunder yang diperoleh dari berita, dokumentasi, dan catatan terkait penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti akan memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi, dan wawancara kepada individu yang dianggap memiliki wawasan tentang situasi sosial tersebut. Penentuan informan penelitian dilakukan secara purposive, yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Tahapan menganalisis dalam penelitian ini yaitu:

1. Reduksi data yaitu proses analisis dari catatan yang didapatkan ketika di lapangan. Kemudian disederhanakan dan dikelompokkan untuk ditarik kesimpulan.
2. Penyajian data yaitu analisis data melalui sekumpulan informasi yang disusun untuk

ditarik kesimpulan dan tindakan yang akan dilakukan dalam penelitian. Penyajian data dapat menggunakan grafik, began, ataupun matriks yang digabungkan menjadi informasi selaras sehingga dapat menentukan kesimpulan dari masalah yang diteliti.

3. Kesimpulan yaitu proses analisis dengan pengumpulan data terakhir dan berganung pada Kumpulan data ketika dilapangan dengan disatukan lebih jelas dan rinci.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian ini di Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon yang berada di Jl. KH. Abdul Latif Kav. Blok J No. 2 Bendungan Kota Cilegon Provinsi Banten. Pembuatan tim anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon ialah langkah dini pembuatan Komisi Pemilihan Umum yang berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum no. 68 tahun 2003 tentang tata metode pilih serta penetapan keanggotaan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/ Kota. Hingga dengan seluruh kewenangan kepala Walikota Cilegon membentuk regu pilih dengan SK no 270. 05/ KEP/ 384- ORG/ 2003. KPU Kota Cilegon memiliki beberapa bagian diantaranya bagian keuangan, umum dan logistik, bagian teknis penyelenggaraan pemilu, bagian perencanaan data dan informasi, serta bagian

hukum dan sumber daya manusia.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon berpedoman kepada undang-undang nomor 12 tahun 2003 pasal 31. Profil komisaris dan anggota KPU Kota Cilegon terdiri dari:

- Ketua: Patchurrohman, S.Hi
- Anggota: Urip Haryantoni, S.Pd.I
- Anggota: Agung Kurniansyah, S.I.P
- Anggota: Cecep Purnama Asri, S.Sy., MH
- Anggota: Nunung Nurjanah, S.Pd., M.Si
- Sekretaris: Drs. H. Adhytiya Chandra, M.Si

Penelitian ini dilakukan dengan observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengunjungi informan dan bertanya langsung kepada informan atau narasumber terkait yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Melalui proses pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk observasi dan wawancara diperoleh informan sebanyak 3 (tiga) orang yaitu 2 (dua) orang dari KPU Kota Cilegon dan 1 (satu) orang dari Bawaslu Kota Cilegon.

Komunikasi politik memandang komunikator merupakan orang yang berperan sebagai pengarah dalam proses komunikasi. Berbicara mengenai komunikasi politik, komunikator dipandang sebagai kumpulan individu atau lembaga. Komunikator politik

terlibat dalam proses opini publik yang menjalankan peran utama yaitu peran sosial. Dengan opini tersebut komunikator membuat ide yang tidak diterima untuk dipertimbangkan dan dapat diterima.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon menjadi komunikator politik yang paham akan perannya, dimana KPU Kota Cilegon menjadi komunikator kedua setelah komunikator pertama yaitu KPU Provinsi Banten. Pemilihan umum 2024 mendatang membutuhkan peran penting komunikator untuk masyarakat dalam proses opini publik karena ide dan gagasan yang diterima oleh masyarakat Kota Cilegon.

Proses komunikasi politik dalam pemilihan umum 2024 terselenggara melalui KPU Provinsi Banten selaku penyelenggara pemilu dan menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pemilu khususnya di wilayah Banten, termasuk Kota Cilegon. Dari hal tersebut, daya tarik KPU Kota Cilegon belum terbentuk dimata publik. KPU Kota Cilegon sebagai komunikator politik perlu turun kelapangan untuk mencari faktanya sehingga tidak ada yang terlewat dan tidak ada hambatan dalam proses komunikasi politik yang dilakukan oleh KPU Kota Cilegon.

Komunikator politik harus memiliki nilai kredibilitas atau kepercayaan di masyarakat. KPU Kota Cilegon memahami nilai tersebut dengan membentuk tim sosialisasi yang ahli di

bidangnya dan memahami pesan yang akan disampaikan dalam proses komunikasi politik dari KPU Kota Cilegon ke masyarakat. Komunikator politik yang memiliki nilai kredibilitas dalam penyampaian pesannya dengan tujuan pemilihan umum 2024 akan berdampak pada penilaian publik atau komunikasi sebagai penerima pesan bahwa pesan yang disampaikan oleh komunikator yaitu KPU Kota Cilegon adalah faktual. KPU Kota Cilegon memahami bahwa telah menyeleksi ketat orang-orang yang terlibat menjadi petugas atau panitia dalam pemilihan umum 2024.

Menjunjung nilai kredibilitas merupakan upaya KPU Kota Cilegon dalam menekan angka golput di Kota Cilegon sesuai pada teori penelitian ini. Berdasarkan dari hasil wawancara yaitu keterlibatan langsung komisioner KPU pada tingkat provinsi maupun kabupaten yang memiliki keahlian, kepercayaan dan daya tarik yang kuat dapat memenuhi KPU sebagai komponen seorang komunikator yang baik.

Pesan dalam komunikasi memiliki tujuan tertentu. Ini memastikan metode yang wajib diambil, apakah metode data, metode persuasi ataupun metode instruksi. Dalam suatu pesan ada tujuan-tujuan yang mau di informasikan, dalam tujuan tersebut pasti wajib bisa membiasakan suasana serta keadaan sosial warga yang hendak dituju. Dalam pengelolaan

pesan, terdapat 3 metode ialah metode data, metode persuasi serta metode intruksi. Pada pemilihan umum 2024 yang dicoba oleh KPU Kota Cilegon cuma menerima pesan-pesan yang telah diolah dari KPU Provinsi Banten tanpa terdapatnya pengelolaan pesan lain serta langsung di informasikan kepada warga luas.

Walaupun hanya pesan informatif yang dikirimkan oleh KPU Provinsi Banten dan KPU Kota Cilegon, peran pihak ketiga dalam penyampaian pesan sangat relevan terhadap pesan yang disampaikan di KPU Kota Cilegon. Dengan demikian, pihak ketiga yang tidak terikat dapat berfungsi sebagai komunikator tambahan kepada warga untuk mencapai tujuan pesan.

Analisis pesan politik yang disampaikan oleh KPU Kota Cilegon kepada warga menunjukkan bahwa intinya adalah mengajak, membujuk, dan menyebarkan pengetahuan politik kepada warga yang memiliki hak pilih untuk mengambil bagian dalam pemilihan umum 2024 dengan memberikan suaranya melalui kotak suara yang disediakan pada hari pemilihan Dalam Negeri yang menganut demokrasi secara langsung, kasus yang senantiasa timbul merupakan rendahnya tingkatan partisipasi warga dalam memakai hak pilihnya. Kasus ini yang setelah itu pula timbul pada Pemilihan umum tahun-tahun lebih dahulu.

Faktor yang menyebabkan terjadinya golput dalam penelitian ini dinilai menjadi masalah yang klasik bagi peneliti. Pemilihan umum dari tahun ke tahun bahkan disetiap daerah memiliki permasalahan yang sama seperti ini sehingga tidak ada upaya perbaikan dalam proses pemilihan umumnya

KPU Cilegon dalam menjadi komunikator politik hanya berperan dalam menerima serta langsung memberitahukan data yang diterima tanpa memilah apa yang didapatkan dari KPU Provinsi Banten sehingga data tersebut tidak dikaji ulang untuk mempersiapkan dan melihat realita di lapangan. Golput dari hasil observasi peneliti terlihat bahwa banyaknya warga yang tidak memilah baik dengan alibi telah tidak peduli terhadap pemilu, tidak masuk dalam DPT, memilah senantiasa bekerja maupun lebih baik menghabiskan Waktu dengan keluarga, serta menjadikan golput sebagai pilihannya.

Golput berawal dari pemikiran yang didasari oleh sikap pragmatis dalam menyikapi pemilu. Mereka hanya mementingkan modul mereka sendiri. Ini adalah kebiasaan yang sudah lama ada yang berasal dari upaya calon untuk mengumpulkan uang selama aktivitas pemilu. Baik pelaku maupun penerimanya harus dihukum dengan sanksi yang jelas dan tegas. Pada awalnya hanya sebagai gerakan moral, golput masuk ke masyarakat dalam berbagai bentuk berdasarkan pengalaman

mereka sendiri. Karena terlalu sibuk dengan berbagai masalah, KPU saat ini tidak dapat melakukan banyak hal.

KPU selaku sumber yang menghasilkan pesan wajib betul-betul memahami modul yang hendak di informasikan, pesan tersebut wajib efektif dan efektif. Posisi KPU Kota Cilegon selaku pelaksana pemilu ini memanglah cuma menerima pesan-pesan yang di informasikan dari KPU Provinsi serta Pusat. Pesan yang di informasikan dalam sosialisasi berbentuk modul sosialisasi kepada warga, yang berisi seluruh perihal yang berhubungan dengan pemilihan umum tahun 2024, informatif serta intruksif merupakan karakteristik pesan yang disampaikan kepada masyarakat. Media massa menjadi media persebaran informasi komunikasi politik yang dilakukan oleh KPU Kota Cilegon, dengan harapan sanggup membentuk giat sosialisasi yang efisien serta sanggup mencakup segala warga di Kota Cilegon khususnya.

Perihal inilah yang sesungguhnya wajib dimengerti selaku komunikator, KPU Kota Cilegon wajib sanggup menghasilkan energi tarik kepada warga buat memperoleh simpati terhadap apa yang di informasikan. Tidak hanya itu, KPU Kota Cilegon sesungguhnya memiliki pandangan atau nilai kepercayaan yang baik guna secara langsung sebagai komunikator yang memberikan pesan kepada warga. Selaku komunikator, KPU Cilegon

melakukan sebagian aktivitas yang antara lain merupakan Sosialisasi ke pemilih pendatang baru, pemilih wanita, pemilih lanjut usia, ke lapas, Goes To Campus serta Goes To School. Kecenderungan aktivitas yang menunjukkan komunikasi satu arah dicoba oleh KPU Kota Cilegon Komunikasi satu arah merupakan pesan yang di informasikan oleh sumber kepada sasaran serta sasaran tidak bisa ataupun tidak memiliki peluang buat membagikan umpan balik ataupun bertanya.

Kekurangan yang dimiliki oleh komunikasi satu arah adalah tidaknya terdapatnya umpan balik yang dicoba sehabis pemberian data tersebut, perihal ini dapat menyebabkan dampak buruk dari pemakaian satu arah ini. Komunikator serta komunikan tidak menjalankan komunikasi yang berkaitan lewat media yang sama, maksudnya cuma satu pihak melainkan dengan pihak lain untuk dapat saling mencermati. KPU wajib mengenali kebutuhan warga supaya warga ingin tiba ke TPS serta melakukan pencoblosan dengan memakai hak pilihnya selaku perwujudan demokrasi. Di luar tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu, partai politik, organisasi non-terikat, dan sukarelawan pemilu dapat mengajarkan politik kepada warga secara konsisten, tidak hanya selama masa pemilu, tetapi di luar aktivitas pemilu. Pemahaman politik warga sangat dipengaruhi oleh hal ini. Jika ini benar-benar dapat terjadi,

penyelenggaraannya harus dilakukan oleh mereka dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga mereka dapat meningkatkan partisipasi pemilih secara merata.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon tentang bagaimana kedudukan KPU Kota Cilegon dalam memencet angka golput pada pemilihan umum 2024, hingga bisa ditarik kesimpulan, ialah:

Komunikator ialah KPU Kota Cilegon dalam memencet angka golput pada pemilihan umum 2024 cenderung dalam tiap sosialisasi pemilu memakai komunikasi satu arah. Kecenderungan yang dimiliki dari komunikasi satu arah adalah komunikan cuma selaku pendengar sejati dari data yang di informasikan oleh komunikator, data yang di informasikan cuma bersumber pada kebutuhan sendiri tanpa memandang secara luas, sehingga feedback yang terbentuk tidak sesuai dengan giat yang dilakukan dan tujuannya. PPK serta PPS masih kurang mempunyai energi tarik yang kokoh tentang kepemiluan walaupun memiliki kredibilitas ataupun keyakinan didalam segmentasi yang dimilikinya.

Tiap alur komunikasi memiliki muatan pesan komunikasi. Pesan ialah komponen

komunikasi yang wajib terdapat supaya dapat berlangsung dengan baik, dalam makna proses komunikasi berlangsung memiliki muatan ataupun isi komunikasi. Dalam perihal ini, proses pembentukan pesan yang dicoba oleh KPU pemilihan umum 2024 memiliki makna-makna yang maknanya sulit dicerna secara baik oleh warga. Pesan-pesan cuma berisikan gambaran serta perkata yang normatif tetapi tidak mempunyai makna betapa berartinya suara atau pilihan masyarakat dalam kegiatan pesta demokrasi pemilihan umum. Pengelolaan pesan tersebut disalurkan dengan memakai media-media sehingga pesan-pesan tersebut tidak bisa dilihat feedback secara langsung oleh KPU Cilegon, telah diterima ataupun tidaknya pesan tersebut.

Saran Untuk rumpun ilmu komunikasi, sosial serta politik, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

Pada proses komunikasi, kedudukan komunikator harus menarik dan kredibel. Dengan demikian, komunikator akan dapat mengirimkan data kepada khalayak untuk mencapai timbal balik yang diinginkan.

Informasi harus kejelasan, merata, pas, ringkas, dan sopan. Pesan—Pesanan seperti ini harus mudah dipahami oleh khalayak yang dituju. Kemudian, Untuk KPU Kota Cilegon dalam melakukan sosialisasi, paling utama dalam posisi selaku komunikator serta pengelolaan pesan merupakan:

Komunikator selaku simbol utama KPU dalam mengantarkan data kepada warga supaya lebih diterima oleh masyarakat harus menguatkan karakter.

Pemakaian media massa spesialnya media sosial lebih digiatkan, supaya segala warga bisa betul-betul mengenali jalannya pemilu dan bisa menimalisir kekalahan pemberitaan dari wilayah lainnya. Politik yang diselenggarakan harus berkesinambungan terhadap kebutuhan warga dengan mencakup segala unsur termasuk pada status sosial, supaya kredibilitas KPU sebagai penyelenggara acara dapat terlihat melalui pemahaman warga terus menjadi terbuka hendak berartinya berpolitik

Kesimpulannya, periset berharap seluruh stakeholder yang terdapat di Kota Cilegon menyadari kalau aktivitas pemilu wajib dilaksanakan semaksimal bisa jadi, sebab ini memastikan nasib warga Indonesia dalam 5 tahun kedepan

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N., & Mulyadi, A. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Mengurangi Angka Golput pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 1(1), 1-9.
- Desuari, H. D. (2016). Manajemen Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Jogja (Studi Kasus Manajemen Komunikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jogja dalam Upaya Menekan Angka Golput tahun 2014) (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 8(1).
- Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 5-16.
- Gun Gun Heryanto, S. R. (2013). Komunikasi politik sebuah pengantar.
- Heryanto, G. G. (2018). Media Komunikasi Politik. *IRCiSoD*.
- Heryanto, G. G. (2018). Problematika Komunikasi Politik. *IRCiSoD*.
- Indra, D., Wahid, U., & Magister, P. (2021). Tinjauan Literatur: Digital Komunikasi Politik
- Anies Baswedan. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 228-239.
- Muhtaruddin, M., Gumelar, R. G., & Ahmad, I. (2019). PERAN KPU KABUPATEN TANGERANG DALAM MENEKAN ANGKA GOLPUT PADA PEMILIHAN GUBERNUR 2017 (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Muslimin, K. (2019). Buku ajar komunikasi politik. Unisnu Press. Pureklolon, T. P. (2016). Komunikasi politik. Gramedia Pustaka Utama.
- Shahreza, M. (2018). Pengertian Komunikasi Politik.
- Susanto, E. H. (2017). Media sosial sebagai pendukung jaringan komunikasi politik. *Jurnal Aspikom*, 3(3), 379-398.
- Susanto, E. H. (2013). Dinamika komunikasi politik dalam pemilihan umum. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(2), 163-172.
- Tosepu, Y. A. (2018). Media Baru dalam Komunikasi Politik (Komunikasi Politik I Dunia Virtual). Jakad Media Publishin